

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

3.1 Demografi Daerah Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Lahirnya Kabupaten Padang Lawas melalui pertimbangan dan proses yang panjang disamping memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Penetapan Kabupaten Padang Lawas didasarkan pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Barumon Kelurahan Sibuhuan yang terdiri dari 17 kecamatan.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 luas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3.912.18 km². Wilayah Kabupaten Padang Lawas bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal), dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi (Kabupaten Tapanuli Selatan) dan Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan).

Wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 304 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Hutaraja Tinggi termasuk bagian dari wilayah di Kabupaten Padang Lawas yang paling luas sebesar 663,24 Km², sementara Kecamatan Barumon Baru adalah kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya yaitu sebesar 13,73 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Distribusi Luas (%)
1	Sosopan	22	-	435,18	11,12
2	Ulu Barumun	15	-	207,43	5,30
3	Barumun	17	1	126,10	3,22
4	Barumun Baru	13	-	13,73	0,35
5	Barumun Selatan	11	-	109,87	2,81
6	Lubuk Barumun	24	-	289,58	7,40
7	Sosa	16	-	283,52	7,25
8	Sosa Julu	12	-	155,95	3,99
9	Ulu Sosa	11	-	211,67	5,41
10	Sosa Timur	13	-	159,55	4,08
11	Batang Lubu Sutam	20	-	184,75	4,72
12	Hutaraja Tinggi	26	-	663,24	16,95
13	Huristak	27	-	523,59	13,38
14	Barumun Tengah	29	-	119,40	3,05
15	Aek Nabara Barumun	25	-	329,36	8,42
16	Sihapas Barumun	13	-	48,25	1,23
17	Barumun Barat	10	-	51,01	1,30
Kabupaten Padang Lawas		304	1	3.912,18	100

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023

3.1.1 Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah

satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Aspek demografi atau kependudukan menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan komposisi penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2018 sebanyak 11.158 jiwa mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebanyak 11.389 jiwa, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 10.389 jiwa, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 jumlah penduduk kembali mengalami peningkatan dari 10.463 jiwa hingga 10.570 jiwa. Sebagaimana lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas 2018-2022

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sosopan	11,158	11,389	10,389	10,463	10,570
2	Ulu Barumun	17,034	17,388	16,7	16,903	17,161
3	Barumun	53,496	54,607	53,2	41,49	42,180
4	Barumun Selatan	8,238	8,409	7,954	8,039	8,150
5	Sosa	38,587	39,389	38,858	20,341	20,726
6	Lubuk Barumun	19,682	20,091	20,024	12,434	12,642
7	Batang Lubu Sutam	14,564	14,866	12,383	19,838	20,257
8	Hutaraja Tinggi	48,075	49,074	43,605	9,13	9,213
9	Huristak	24,044	24,544	18,652	10,47	10,681
10	Barumun Tengah	22,051	22,508	20,454	8,129	8,170

11	Aek Nabara Barumun	13,027	13,298	13,107	39,476	39,823
12	Sihapas Barumun	5,559	5,676	5,685	8,64	8,684
13	Sosa Julu	-	-	-	18,69	18,784
14	Ulu Sosa	-	-	-	16,364	16,47
15	Sosa Timur	-	-	-	13,3	13,537
16	Barumun Baru	-	-	-	5,778	5,89
17	Barumun Barat	-	-	-	4,234	4,336
Jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas		278,404	281,239	261,011	263,719	267,275

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023

Rasio Pertumbuhan penduduk Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 setiap tahunnya mengalami Penurunan dari 2,22 Persen menjadi 1,36 persen. sebagaimana lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pertumbuhan Penduduk kabupaten Padang Lawas 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Penduduk	2,22	2,20	1,91	1,39	1,36

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023

Jika dilihat dari data jumlah dan struktur umur penduduk, distribusi penduduk Kabupaten Padang Lawas terbesar terdapat dalam kelompok umur 5-9 tahun sebesar 11,04 persen, sementara distribusi penduduk terkecil terdapat dalam kelompok umur 75+ sebesar 0,69 persen.

Jika dilihat dari agama yang dianut oleh penduduk maka masyarakat

Kabupaten Padang Lawas paling banyak memeluk agama Islam yakni sebesar 94,98 persen dan diikuti oleh agama Kristen Protestan dengan total sebesar 4,78 persen dan Kristen Katolik dengan total sebesar 0,17 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Wilayah	Umat Agama (Persen)							Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Budha	Konghucu	Hindu	Lainnya	
1	Kabupaten Padang Lawas	94,98	4,78	0,17	0,00	0,00	0,00	0,7	100
2	Provinsi Sumatera Utara	95,23	40,84	11,29	39,9	27,78	16,08	0,00	230,30

Sumber: Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023
Provinsi Sumatera dalam Angka, Tahun 2023

Rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Padang Lawas tertinggi terdapat di Kecamatan Sosa Timur sebesar 107,6 persen kemudian Kecamatan Ulu Sosa merupakan rasio jenis kelamin terendah yaitu sebesar 99,5 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sosopan	16	47	63	101,8
2	Ulu Barumon	15	44	59	100,9
3	Barumon	458	532	990	100,1
4	Barumon Selatan	8	26	34	102,7

5	Barumun Baru	4	4	8	100,1
6	Lubuk Barumun	103	127	230	103,1
7	Sosa	18	100	118	100,5
8	Ulu Sosa	6	5	11	99,5
9	Sosa Julu	11	2	13	100,4
10	Batang Lubu Sutam	29	42	71	99,9
11	Huta Raja Tinggi	36	125	161	103,3
12	Sosa Timur	15	1	16	107,6
13	Huristak	15	53	68	104,1
14	Barumun Tengah	20	64	84	100,5
15	Aek Nabara Barumun	18	31	49	101,1
16	Sihapas Barumun	21	49	70	99,8
17	Barumun Barat	8	2	10	101,1
Kabupaten Padang Lawas		1,227	2,412	3,639,00	101,6

Sumber: Padang Lawas dalam Angka, Tahun 2023

Jika dilihat dari agama yang dianut oleh penduduk maka masyarakat Kabupaten Padang Lawas paling banyak memeluk agama Islam yakni sebesar 94,98 persen dan diikuti oleh agama Kristen Protestan dengan total sebesar 4,78 persen dan Kristen Katolik dengan total sebesar 0,17 persen.

Rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Padang Lawas tertinggi terdapat di Kecamatan Sosa Timur sebesar 107,6 persen kemudian Kecamatan Ulu Sosa merupakan rasio jenis kelamin terendah yaitu sebesar 99,5 persen.

3.1.2 Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Padang Lawas merupakan bagian dari struktur ekonomi wilayah Sumatra Utara yang ditopang oleh sektor-sektor primer, khususnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karakteristik wilayah yang didominasi oleh lahan perkebunan kelapa sawit, karet, dan pertanian pangan menjadikan aktivitas ekonomi masyarakat bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks pembangunan daerah,

dinamika ekonomi Padang Lawas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas akses pasar dan investasi.

Gambaran Umum Ekonomi di Kabupaten Padang Lawas Struktur ekonomi Padang Lawas secara umum didominasi oleh sektor-sektor berikut:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor terbesar yang memberikan kontribusi utama terhadap PDRB. Komoditas unggulan meliputi:
 - a. Kelapa sawit
 - b. Karet
 - c. Padi sawah dan ladang
 - d. Jagung
 - e. Peternakan (sapi, kambing, unggas)
2. Sektor Perkebunan
Perkebunan sawit menjadi penggerak ekonomi terbesar, baik dari sisi produksi, serapan tenaga kerja, maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah.
3. Sektor Perdagangan dan Jasa
Berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan pasar tradisional, dan aktivitas UMKM.
4. Sektor Konstruksi dan Infrastruktur
Tumbuh sejalan dengan pembangunan jalan, irigasi, sarana publik, serta investasi properti dan fasilitas pemerintah.
5. Sektor Transportasi dan Pergudangan
Mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan menuju pasar regional seperti Padangsidempuan, Rantauprapat, dan Medan.

Permasalahan Ekonomi Daerah dalam perkembangan ekonomi, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi:

1. Ketergantungan pada sektor primer sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.
2. Keterbatasan infrastruktur pendukung, terutama di wilayah pedesaan.
3. Daya saing UMKM yang masih rendah akibat minimnya akses modal dan teknologi.
4. Kualitas sumber daya manusia yang belum merata antar kecamatan.
5. Belum optimalnya industrialisasi hilir, khususnya industri pengolahan sawit dan karet.

Indikator-Indikator Ekonomi Kabupaten Padang Lawas, indikator ekonomi digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan menilai kinerja perekonomian daerah. Berikut indikator utama:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan total nilai produksi barang dan jasa di Padang Lawas. Dapat dianalisis berdasarkan:
 - a. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)
 - b. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)
 Digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi tahunan.
2. Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Mengukur peningkatan output daerah dari tahun ke tahun.
 - b. Menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi berkembang.
3. Struktur Ekonomi
 - a. Persentase kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB.
 - b. Menentukan apakah ekonomi didominasi sektor primer, sekunder, atau tersier.
4. Tingkat Kemiskinan
 - a. Menggambarkan proporsi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Menjadi indikator kesejahteraan masyarakat.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Mengukur kualitas penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor ekonomi.

6. Pendapatan Per Kapita
 - a. Mengindikasikan kemampuan ekonomi rata-rata penduduk.
 - b. Digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan.
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - a. Mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
 - b. Berpengaruh langsung terhadap produktivitas ekonomi daerah.
8. Kinerja UMKM
 - a. Jumlah unit usaha, serapan tenaga kerja, dan nilai produksi.
 - b. Sangat penting karena UMKM menjadi penopang ekonomi lokal.
9. Inflasi Daerah
 - a. Mengukur stabilitas harga barang dan jasa.
 - b. Mempengaruhi daya beli masyarakat.

Ekonomi Kabupaten Padang Lawas ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi motor utama aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan penguatan sektor non-pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur dan industrialisasi hilir. Indikator-indikator ekonomi seperti PDRB, kemiskinan, pengangguran, IPM, dan tingkat investasi menjadi instrumen penting dalam menganalisis kinerja ekonomi daerah secara komprehensif sesuai kaidah penulisan akademik.

3.1.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Di Kabupaten Padang Lawas, pemerintah daerah menempatkan peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam penyediaan sarana, peningkatan kompetensi pendidik, serta perluasan layanan pendidikan pada seluruh jenjang.

Secara umum, kondisi pendidikan di Kabupaten Padang Lawas menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana di sejumlah kecamatan, rendahnya angka partisipasi masyarakat pada jenjang menengah dan tinggi, serta ketimpangan kualitas antar sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berkisar di jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama, yang menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat baru menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP. Kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan akses dan retensi pendidikan agar lulusan di tingkat menengah dan tinggi semakin bertambah.

Di samping itu, sebaran penduduk menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa proporsi masyarakat yang menamatkan SD dan SMP lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA atau perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik karena faktor ekonomi, akses geografis, maupun kurangnya fasilitas pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi di wilayah tersebut. Dengan demikian, pendidikan di Kabupaten Padang Lawas masih memerlukan penguatan kebijakan, terutama pada aspek pemerataan layanan dan peningkatan mutu pembelajaran.

Indikator Pendidikan di Kabupaten Padang Lawas. Untuk memahami kondisi pendidikan secara komprehensif, terdapat sejumlah indikator yang umum digunakan dalam kajian akademik. Indikator-indikator ini berfungsi untuk mengukur capaian pembangunan pendidikan secara kuantitatif dan memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai standar nasional.

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator utama yang menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk dalam pendidikan formal. Nilai RLS di Kabupaten Padang Lawas berada pada kisaran 9–10 tahun, yang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk menamatkan

pendidikan hingga tingkat SMP. Indikator ini sekaligus mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dasar, namun juga memperlihatkan tantangan dalam meningkatkan partisipasi pada jenjang pendidikan menengah atas.

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu. Pada jenjang SD dan SMP, partisipasi masyarakat Padang Lawas tergolong tinggi, namun pada jenjang SMA dan sederajat terjadi penurunan signifikan. Fenomena ini umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi keluarga, keterbatasan sarana pendidikan menengah di wilayah pedesaan, dan motivasi belajar yang belum optimal.

c. Tingkat Pendidikan Penduduk Komposisi tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator penting untuk melihat pencapaian pendidikan masyarakat. Persentase penduduk yang telah menamatkan SD dan SMP cenderung lebih dominan dibanding lulusan SMA dan perguruan tinggi. Rendahnya jumlah lulusan perguruan tinggi menandakan perlunya strategi peningkatan kesempatan pendidikan tinggi, baik melalui beasiswa, pendidikan vokasi, maupun kemitraan dengan perguruan tinggi di wilayah Sumatera Utara.

d. Sarana dan Prasarana Pendidikan Ketersediaan sarana pendidikan—seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi sekolah, dan media pembelajaran—menjadi indikator yang menentukan kualitas proses belajar mengajar. Di beberapa kecamatan, ketersediaan fasilitas pendidikan masih belum merata, terutama pada jenjang menengah. Ketimpangan ini dapat berpengaruh pada kualitas pembelajaran dan motivasi siswa untuk melanjutkan sekolah.

e. Kualitas dan Kompetensi Guru Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi pendidik. Rasio guru terhadap siswa, tingkat kualifikasi akademik, serta sertifikasi pendidik merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kapasitas sekolah dalam memberikan pendidikan bermutu.

Kabupaten Padang Lawas terus melakukan peningkatan melalui program pelatihan, sertifikasi, dan pemerataan distribusi guru, namun beberapa sekolah di daerah terpencil masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik.

f. Angka Putus Sekolah menggambarkan proporsi siswa yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang tertentu. Di Kabupaten Padang Lawas, angka putus sekolah relatif lebih tinggi pada jenjang SMP menuju SMA. Faktor ekonomi keluarga, minimnya fasilitas pendidikan menengah atas, serta jarak sekolah menjadi penyebab utama siswa tidak melanjutkan pendidikan.

g. Dukungan Pembiayaan Pendidikan Indikator ini meliputi besaran anggaran pendidikan dalam APBD, beasiswa, bantuan operasional sekolah, dan program kesejahteraan siswa lainnya. Alokasi anggaran yang memadai dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan, terutama dalam mengurangi kesenjangan akses antara sekolah di pusat kota dan kecamatan terpencil.

Berdasarkan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Kabupaten Padang Lawas telah menunjukkan kemajuan pada aspek akses dan penyediaan fasilitas dasar. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada pemerataan sarana, peningkatan kualitas guru, serta peningkatan partisipasi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Rendahnya angka lulusan SMA dan perguruan tinggi menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara lebih komprehensif.

3.1.4 Keagamaan

Kabupaten Padang Lawas dikenal sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yang membentuk kultur sosial masyarakat yang kuat dengan tradisi dan nilai-nilai keislaman. Kehadiran pesantren, madrasah, masjid, organisasi keagamaan, serta adat yang berakar pada syariat menjadi ciri utama karakter keagamaan di daerah ini.

Selain itu, aktivitas keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, dan pendidikan diniyah memiliki peran signifikan dalam membentuk moralitas sosial. Pemerintah daerah juga turut berperan dalam fasilitasi kegiatan keagamaan melalui kebijakan pembinaan umat, pemberdayaan lembaga pendidikan keagamaan, serta penguatan kerukunan antarumat beragama. kehidupan keagamaan masyarakat di Padang Lawas dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama:

1. Dimensi Keyakinan (*Belief*)

Menggambarkan sejauh mana masyarakat memegang teguh ajaran agama, seperti keyakinan terhadap nilai-nilai tauhid, norma moral, dan etika Islam yang menjadi landasan perilaku.

2. Dimensi Ritual (*Ritual Practice*)

Terlihat dari praktik ibadah sehari-hari, seperti shalat berjemaah, puasa, kegiatan masjid, pelaksanaan zakat, serta partisipasi dalam kegiatan keagamaan komunal.

3. Dimensi Sosial-Kelembagaan (*Institutional Practice*)

Meliputi keberadaan lembaga pendidikan keagamaan, organisasi Islam, majelis taklim, serta peran pemerintah daerah dalam membina kehidupan agama.

Indikator-Indikator Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Padang Lawas. Indikator keagamaan harus bersifat terukur, teramati, dan dapat dianalisis. Adapun beberapa indikatornya adalah:

1. Indikator Infrastruktur Keagamaan jumlah masjid dan musala sebagai pusat kegiatan ibadah. Keberadaan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan nonformal keagamaan. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan hari besar keagamaan.
2. Indikator Aktivitas Keagamaan Masyarakat tingkat partisipasi masyarakat dalam shalat berjemaah. keikutsertaan dalam pengajian, majelis taklim, dan kegiatan dakwah. pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh masyarakat.

3. Indikator Pendidikan Keagamaan jumlah dan kualitas lembaga pendidikan berbasis Islam. program pembinaan keagamaan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat. tingkat literasi keagamaan masyarakat (kemampuan membaca Al-Qur'an, pemahaman dasar agama, dll).
4. Indikator Sosial-Budaya Keagamaan tradisi sosial berlandaskan nilai Islam, seperti gotong royong, adat pernikahan, dan kegiatan sosial lain. perilaku moral dan etika masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
5. Indikator Kerukunan Antarumat Beragama tingkat toleransi dan kerja sama antar pemeluk agama, minimnya konflik berbasis agama, dan program pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial.
6. Indikator Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Anggaran untuk kegiatan keagamaan, program pemberdayaan lembaga keagamaan, dan pembinaan ormas Islam dan tokoh agama.

3.1.5 Kesehatan

Secara umum, kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: distribusi fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola program kesehatan. Kabupaten ini terdiri dari wilayah yang relatif luas dengan karakteristik desa-desa yang tersebar, sehingga tantangan utama terletak pada pemerataan layanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Fasilitas kesehatan yang tersedia meliputi rumah sakit umum daerah, puskesmas rawat inap, puskesmas non-rawat inap, puskesmas pembantu, serta posyandu yang tersebar di kecamatan dan desa. Namun demikian, jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar rasio nasional.

Indikator-Indikator Kesehatan di Kabupaten Padang Lawas dalam kajian akademik, indikator kesehatan digunakan untuk menilai kualitas sistem kesehatan serta derajat kesehatan penduduk. Indikator ini mengacu pada standar nasional (Kemenkes RI), dan indikator pembangunan kesehatan daerah. Sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup mencerminkan rata-rata usia yang diperkirakan dapat dicapai penduduk. AHH menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur kualitas kesehatan populasi. Daerah dengan AHH tinggi menunjukkan pelayanan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Di Padang Lawas, pencapaian AHH dipengaruhi oleh tingkat kesehatan ibu dan anak, gizi, pola penyakit, dan akses terhadap layanan dasar.
2. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB merupakan indikator sensitif dalam menilai keberhasilan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Faktor penyebab meliputi komplikasi kehamilan, akses menuju fasilitas persalinan, kualitas pelayanan antenatal, serta ketersediaan tenaga kesehatan.
3. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap. Imunisasi menjadi indikator penting dalam mencegah penyakit menular. Cakupan imunisasi yang rendah mengindikasikan adanya hambatan akses, kurangnya penyuluhan, atau persepsi masyarakat terhadap vaksin. Di daerah dengan geografis yang beragam seperti Padang Lawas, pendistribusian vaksin dan pelayanan posyandu menjadi tantangan tersendiri.
4. Jaminan Kesehatan dan Cakupan UHC Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan mencerminkan tingkat perlindungan kesehatan populasi. Kabupaten dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) yang tinggi menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap akses layanan kesehatan yang lebih merata.

Dari indikator-indikator tersebut, dapat dianalisis bahwa persoalan kesehatan di Kabupaten Padang Lawas tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut kesenjangan antarwilayah, rendahnya literasi kesehatan masyarakat, serta ketergantungan pada program nasional seperti imunisasi dan stunting. Pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi antara program promotif, preventif, dan kuratif agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara optimal.

3.2 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas

3.2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas

Pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Padang Lawas telah berubah menjadi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Hal ini didasarkan atas keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

3.2.2 Visi dan Misi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2014 – 2019 adalah :

“Terwujudnya Transportasi, Perumahan Kawasan Permukiman Yang Cepat, Tepat, Andal, Aman, Nyaman Dan Terjangkau Masyarakat Yang Berlandaskan Norma-Norma Agama, Nilai Luhur Adat Istiadat Dan Budaya Yang Dinamis Yang Menuju Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Serta Menopang Perekonomian Dengan Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Profesional Dan Sumber Daya Alam Lestari”

Untuk dapat dijelaskan makna dari setiap kunci yang terangkai dalam VISI sebagai berikut:

1. Transportasi, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang cepat, aman, nyaman dan murah.

Komponen pernyataan visi diatas mengandung pengertian transportasi, perumahan dan kawasan permukiman yang tertib, teratur, rapi, bersih dengan tetap mempertahankan fungsinya untuk masyarakat dengan menaati aturan yang sudah dibuat bersama.

2. Transportasi, Perumahan dan Kawasan Permukiman terjangkau masyarakat dan murah.

Komponen pernyataan visi diatas mengandung pengertian bahwa transportasi, perumahan yang pemanfaatannya dapat dijangkau masyarakat, baik masyarakat perkotaan, pedesaan yang terpencil sesuai dengan kemampuan perekonomian masyarakat dengan perkataan lain harganya murah.

3. Ekonomi Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Setiap kegiatan yang dilakukan lebih mengutamakan padat karya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berkembang secara adil dan merata dengan daya saing yang cukup kompetitif.

4. Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Lestari

Kegiatan pembangunan kedepan harus menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemakmuran masyarakat daerah dengan tetap mempertimbangkan keutuhannya secara lestari.

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2014 – 2019 adalah :

“ Mengantarkan Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Padang Lawas Menuju Yang Lebih Maju Dengan Sarana Dan Prasarana Yang Andal, Ekonomis, Sosial Budaya, Pemeliharaan Lingkungan Dan Pelestarian Adat Budaya, Sumber Daya Alam Melalui Kerja Sama Yang Harmonis Antara Dinas Dengan Komponen Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pusat Serta Pihak Terkait”

Adapun makna dari Misi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Membangun Sistem Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang sejajar dengan Standar Nasional serta sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah.
- b. Membangun mahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang kuat dan berimbang dengan orientasi pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan daerah melalui transportasi yang memadai serta perumahan yang layak huni.
- c. Membangun kondisi sosial budaya yang maju dan adaptif sesuai dengan pengembangan kerukunan ummat beragama, kesetiakawanan sosial, kekerabatan dan kegotong royongan yang tergambar dalam kelembagaan adapt Dalihan Na Tolu.
- d. Membangun struktur dan manajemen system mahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang baik dan profesional sembari terus meningkatkan semangat kerja aparatur pemerintah dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan mahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang baik dan bersih serta bebas KKN.
- e. Memelihara keasrian lingkungan melalui budaya Poda Na Lima dan pengelolaan Sumber Daya Alam.
- f. Membangun dan mengembangkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan antara sesama masyarakat didalam maupun di luar daerah.

Untuk penyusunan dan penetapan visi dan misi mahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas dan Rencana Strategi nilai-nilai yang mempengaruhi kinerja yang timbul dan berkembang didalam administrasi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan antara lain :

- a. Prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas serta penggunaan potensi yang ada;

- b. Kearifan, kecermatan dan pembuatan keputusan;
- c. Rasa kebulatan dan kesatuan dalam suatu system;
- d. Kemauan untuk meningkatkan SDM;
- e. Kemauan untuk bekerja keras dan berdisplin;
- f. Nilai-nilai luhur budaya daerah "*Dalihan Na Tolu*"
- g. Prinsip-prinsip human relation dan public relation.

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas dibentuk melalui Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 36 Tahun 2016. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan.
- b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota
- c. Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data terkait persiapan pelaksanaan Program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
- d. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- e. Penyelenggaraan PSU perumahan. Dan kawasan permukiman
- f. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota
- g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota
- h. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota

3.2.4 Struktur Organisasi

Dalam sebuah instansi baik instansi pemerintahan maupun instansi bisnis, yang disebut sebagai organisasi harus adanya suatu susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Dan susunan ini dapat disebut sebagai struktur organisasi. Yang mana bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagai organisasi atau lembaga pemerintah negara yang memiliki struktur organisasi yang dimaksud.

Struktur organisasi akan nampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi, yang disebut bagan organisasi yaitu satu gambaran dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan, saluran, aliran organisasi yang syah, dalam mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang dalam suatu oraganisasi tersebut, jadi struktur oraganisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam lembaga pemerintahan negara. Karena perlunya pendelegasian wewenang yang jelas merupakan konsekuen dan keterbatasan seseorang dalam memimpin suatu organisasi.